

**PERKIRAAN DAMPAK KRISIS KEUANGAN  
TERHADAP EKONOMI, KHUSUSNYA SEKTOR PERTANIAN DAN  
AGRIBISNIS DI INDONESIA<sup>1)</sup>**

**MANGARA TAMBUNAN<sup>2)</sup>**

Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian  
Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

**ABSTRACT**

Beginning from the monetary crisis of Bath-Thailand, then gradually to spread to south-east Asia Countries and finally has been Indonesia monetary crisis started the third week in July 1997. Monetary crisis this time to indicate that Indonesia economics more and more open and integrated with world economics. Really Indonesia to face three kind crisis i.e.: (1) Exchange rate crisis where depreciation of rupiah value toward dollars, (2) foreign debt crisis in big quantity, which made by private and government, and (3) probably so infected by diminishing expectation of the community toward various of economics and financial institutions

To measure the impact of monetary crisis toward quantitatively economics can be not acted now yet. What that can be acted is to expect its impacts toward economics, especially to agriculture or agribusiness sectors. For need of this research-collected macroeconomics data in the last time that sources from secondary data, processed and analyzed. Because this research especially to expect the impact of monetary crisis toward agriculture or agribusiness sectors, so the agriculture data collected, processed and analyzed detailer.

The result of analysis to indicate that monetary crisis in Indonesia that indicated by has been weak of rupiah value to dollars, has impact toward agriculture or agribusiness sectors. Yet, impact intensity depend on: (1) sources of raw material (domestic or foreign), (2) structure of output marketing for domestic or international, and (3) structure of capital, equity and firm portfolio of agribusiness mentioned. Viewed from costly structure and return, so portion of import of input and export of output in agriculture sector significantly to influence toward performance of agriculture or agribusiness sectors.

For the agriculture or agribusiness firms that using domestic raw material in theirs production process, monetary crisis maybe not influence so big, if mostly theirs output exported, this crisis will positive impact. Yet, if agriculture or agribusiness firms using raw material from foreign in its production process (example cotton), monetary crisis has influence toward costs structure (increase the cost of input and output per unit) to be bigger. If theirs output market for domestic, so will be gloomier. In this condition, monetary crisis has negative influence toward performance of agribusiness mentioned.

Result of the monetary crisis, need be acted a reevaluation to measure rate of return (ROI) investment in agriculture sector. In the last time ROR in agriculture sector only range 15 percent. Not impossible if this monetary crisis has made the populace agriculture is not interesting for investor.

*Keywords: Monetary Crisis, Economics Impact, Agriculture and Agribusiness Sectors.*

- 
- 1) Makalah disampaikan pada Seminar “Krisis Moneter dan Dampaknya Terhadap Agribisnis” di Pusat Studi Pembangunan-Lembaga Penelitian, Institut Pertanian Bogor, tanggal 6 Nopmeber 1997.
  - 2) Guru Besar dan Staff Pengajar Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Managing Director Center for Economic and Social Studies (CESS), Jakarta.

## ABSTRAK

Bermula dari krisis keuangan Baht–Thailand, kemudian secara perlahan merambat ke negara-negara Asia Tenggara dan akhirnya menjadi krisis keuangan Indonesia yang dimulai minggu ketiga bulan Juli 1997. Krisis keuangan yang dialami kali ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia semakin terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi dunia. Sebenarnya Indonesia menghadapi tiga jenis krisis yakni: (1) krisis nilai tukar, yang ditandai oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar, (2) krisis utang luar negeri yang besar jumlahnya, yang dibuat oleh swasta dan pemerintah, dan (3) mungkin juga dihindangi krisis menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai institusi ekonomi dan finansial.

Untuk mengukur dampak krisis moneter terhadap ekonomi secara kuantitatif belum dapat dilakukan sekarang. Apa yang dapat dilakukan adalah memperkirakan dampaknya terhadap ekonomi, khususnya terhadap sektor pertanian dan agribisnis. Untuk kebutuhan penelitian ini dikumpulkan data makro ekonomi masa lalu yang bersumber dari data sekunder, diolah dan dianalisis. Karena penelitian ini secara khusus memperkirakan dampak krisis keuangan terhadap sektor pertanian, maka data di bidang pertanian dikumpulkan, diolah dan dianalisis lebih detail.

Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis keuangan di Indonesia yang ditandai oleh melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS. berdampak terhadap sektor pertanian/agribisnis. Namun intensitas dampaknya tergantung pada: (1) sumber perolehan bahan baku (dalam atau luar negeri), (2) struktur pemasaran output (dalam atau luar negeri), dan (3) struktur permodalan, *equity* dan portofolio usaha agribisnis tersebut. Ditinjau dari struktur pembiayaan dan penerimaan, maka porsi impor input dan ekspor output dalam sektor pertanian akan secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja sektor pertanian.

Bagi perusahaan pertanian dan agribisnis yang menggunakan bahan baku dari dalam negeri, gejala keuangan mungkin tidak berpengaruh demikian besar, dan apabila sebagian besar output diekspor, maka akan memiliki dampak positif. Namun apabila perusahaan agribisnis bersangkutan menggunakan baku dari luar negeri (kapas misalnya), maka implikasi gejala keuangan akan berpengaruh terhadap struktur biaya (meningkatkan biaya per unit input dan output) yang lebih besar. Apabila pasarnya dalam negeri, maka akan semakin suram. Dalam kondisi ini, gejala keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja agribisnis bersangkutan.

Akibat krisis keuangan sekarang, sangat perlu diadakan suatu evaluasi kembali untuk menghitung *rate of return investment* (ROI) di sektor pertanian. Pada masa lalu ROI di sektor pertanian hanya berkisar 15 persen. Tidaklah mustahil kalau krisis ini membuat sektor pertanian rakyat semakin tidak menarik bagi investor.

*Kata Kunci: Krisis Keuangan, Dampak Ekonomi, Sektor Pertanian dan Agribisnis.*

## PENDAHULUAN

### Datangnya Krisis Ekonomi

Di antara dua kemungkinan krisis keuangan: (a) pembayaran utang luar negeri yang berat (*debt crisis*) atau (b) krisis nilai tukar rupiah (*exchange rate*), Steven Redelet (1995) memilih krisis nilai tukar, sedangkan Ross McLeod (1995) cenderung memilih krisis beratnya pembayaran utang luar negeri. Menurut Steven Redelet, krisis hutang luar negeri dan perubahan nilai tukar sebagai masalah yang berkaitan.

Although these two types of events have different characteristics, and can occur independently, it has long been recognized that debt crises almost always exchange rate misalignment. Since foreign debt service payments are part of the overall balance of payments, major developments in debt and debt service (such as an inability to roll over short-term loans, or a bunching of debt service payment) have implications for exchange rate management and exchange rate policy has implications for debt servicing capacity (especially in an intertemporal framework)(Steven Redelet, 1996)<sup>3</sup>.

Bermula dari krisis keuangan Baht–Thailand, kemudian secara berlahan merambat ke negara-negara Asia Tenggara dan menjadi krisis keuangan Indonesia yang dimulai minggu ketiga bulan Juli 1997. Krisis keuangan yang dialami kali ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia semakin terbuka dan terintegrasi dengan ekonomi dunia. Lebih luas dari krisis ekonomi di atas, Indonesia menghadapi tiga jenis krisis yakni: (a) krisis nilai tukar dengan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, (b) krisis utang luar negeri yang besar jumlahnya yang dibuat oleh swasta dan pemerintah, dan (c) mungkin juga dihindangi krisis menurunnya kepercayaan (*deminishing expectation*) masyarakat terhadap berbagai institusi ekonomi dan finansial. Kalau postulasi masalah ini benar, maka persoalan yang dihadapi Indonesia dapat dikatakan cukup berat dan bersifat jangka panjang. Pemerintah bukan tidak menyadari masalah ini dan bahkan telah meminta bantuan kepada IMF yang hasilnya paket bantuan lebih dari US \$ 23 Milyar yang terbungkus dengan reformasi ekonomi berjangka waktu tiga tahun. Pada dasarnya, paket bantuan keuangan dan reformasi ekonomi dari IMF menggambarkan betapa serius permasalahan ekonomi Indonesia untuk dikembalikan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Makalah yang pendek ini tidak bertujuan membahas akar permasalahan krisis keuangan dan ekonomi secara luas, melainkan mencoba membatasi diri hanya menganalisa dimensi dampak krisis keuangan ini terhadap sektor pertanian/agribisnis. Namun demikian, pada awal makalah ini ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu tentang terjadinya krisis keuangan atau moneter tersebut.

---

3) McLeod Ross H. (1994) Indonesia's Foreign Debt in Ross H. McLeod (Ed), Indonesia. Assessment: Finance as a key Sector in Indonesia's Development, Research School of Pacific and Asian Studies, Canberra and Institute of South East Asian Studies Singapore. Comment by Redelet Steven (1995), Indonesian Foreign Debt: Headed for Crisis or Financial Sustainable Growth? BIES, 31 (3). See Comment by Ross H. McLeod (1996) and Final Reply by Steven Redelet in BIES, 32 (2), 1996.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk mengukur dampak krisis moneter terhadap ekonomi secara kuantitatif belum dapat dilakukan sekarang. Apa yang dapat dilakukan adalah memperkirakan dampaknya terhadap ekonomi, khususnya sektor pertanian dan agribisnis. Untuk kebutuhan penelitian ini perlu dikumpulkan data makro ekonomi masa lalu yang bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Karena penelitian ini secara khusus memperkirakan dampak krisis keuangan terhadap sektor pertanian, maka data di bidang pertanian dikumpulkan, diolah dan dianalisis lebih detail.

Perlu ditekankan di sini bahwa hasil penelitian ini sifatnya ingin meletakkan kerangka dasar dan masih bersifat sementara, sehingga hasil analisis dalam makalah ini tidak menunjukkan suatu derajat presisi yang tinggi tentang dampak krisis keuangan terhadap sektor pertanian/agribisnis. Namun demikian, perkiraan dampak ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak sebagai alat untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan yang terjadi.

## **KRISIS KEUANGAN INDONESIA**

### **Proses dan Penyebab**

Untuk menjaga serangan spekulator terhadap rupiah, pemerintah Indonesia pada bulan Agustus 1997 telah mengeluarkan beberapa jurus untuk menghentikan transaksi Surat Berharga Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) dan pengalihan dana BUMN dari bank-bank pemerintah dan swasta ke SBI. Kemudian tidak berhenti di situ, tingkat bunga SBI yang dinaikkan 30 persen untuk satu bulan dan 28 persen untuk 3 bulan (Econit, 1997). Akibatnya lingkaran bulat likuiditas keuangan bank dan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajibannya membayar utang-utangnya terhadap klien menjadi terputus, baik dalam pembayaran rupiah maupun dollar, sehingga ekonomi mengalami "stress berat". Di samping itu pemerintah juga mengeluarkan peraturan penundaan proyek karena ditakutkan uang rupiah digunakan untuk memborong uang dollar. Namun akibatnya, dirasakan sangat fatal (*over kill*).

Dalam suasana yang begitu "stress berat" tersebut, kemungkinan besar bahwa pemilik dollar (pengusaha merangkap spekulator, spekulator dan pemegang dollar yang berjumlah tidak terlalu besar) "memarkir" uang dollarnya di luar negeri, seperti di Singapore dan Hongkong, sehingga likuiditas dollar juga terputus. Menurut Anwar Nasution (1997), walaupun bunga uang ditawarkan tinggi menjelang krisis keuangan, telah terjadi "*capital outflow*" dari Indonesia, sehingga justru membuat nilai rupiah semakin merosot.

Proses pemutusan likuiditas keuangan ini mengantarkan ketidakpercayaan masyarakat (swasta) terhadap pemerintah dan sebaliknya (*a-symmetry information* ?).

Langkanya mata uang dollar di pasar, diduga akibat dari ulah spekulator uang. Namun sangat mungkin apa yang terjadi adalah *Fund Manager* mengalihkan dana dollar dari Indonesia walaupun bunga uang tinggi. Alasannya adalah karena ketidakpastian (*uncertainty*).

Dalam menanggulangi merosotnya nilai rupiah ini pemerintah mengembangkan rupiah dari band intervensi yang berkisar 12 persen. Untuk pengendalian awal pada band intervensi itu pemerintah telah menghabiskan cadangan devisa hingga diperkirakan hanya tersisa US \$ 12 milyar. Namun demikian tidak ada tanda-tanda yang meyakinkan nilai tukar akan membaik dan bahkan kondisi keuangan tetap memburuk, bunga uang tinggi dan kemungkinan inflasi yang hebat bisa saja terjadi. Dalam kondisi memburuknya ekonomi inilah pemerintah meminta suntikan uang dollar melalui IMF karena kuatir keadaan ekonomi semakin memburuk.

Dari uraian proses terjadinya kemerosotan nilai tukar rupiah di atas dapat diketahui bahwa nilai tukar itu sendiri tidak dapat dilihat sebagai faktor yang terisolasi, melainkan berakar pada berbagai faktor yang melatar belakangi atau mendasarinya. Melihat masalah inilah para ahli ekonomi menunjuk sebagai masalah perekonomian. Misalnya, baik klaim Bank Dunia atau pemerintah yang mengatakan "*fundamental economy*" Indonesia yang cukup kuat tidak sepenuhnya benar. Banyaknya bank bermasalah, neraca berjalan defisit, kredit macet, dan akspor non migas yang melemah telah digunakan secara luas untuk menunjukkan kelemahan dan ketidak efisienan struktur ekonomi Indonesia. Melihat tiga paket utama IMF yang disetujui Indonesia yakni: (a) penyehatan sektor keuangan dan moneter -- antara lain likuidasi perbankan, (b) pembenahan sektor fiskal -- antara lain penghapusan berbagai subsidi dan, (c) penyesuaian struktural yang menyangkut tarif, mobnas dan industri strategis. Semua faktor ini tidak bisa tidak menunjukkan bahwa memang masalah fundamental ekonomi masih memiliki kelemahan. Salah satu akar permasalahan adalah pada masa lalu yakni pinjaman dollar pada pemerintah dan swasta Indonesia telah digunakan untuk membiayai proyek yang tidak terlalu menopang ekspor non-migas dan produktivitas ekonomi, seperti mobnas dan "industri strategis". Seharusnya tiap dollar yang dipinjam atau masuk ke tangan swasta harus digunakan untuk "menggali dollar" lagi. Akan tetapi permasalahannya, mengapa tiba-tiba dollar langka, sehingga dollar mengalami apresiasi ?

## **Faktor Eksternal**

Faktor penyebab krisis keuangan di Indonesia datang dari dua sisi yaitu eksternal dan internal. Tindakan pemerintah menanggulangi krisis keuangan dengan mengendalikan SBI dan SPBU dengan menegatkan fiskal menyebabkan terjadinya “*stress*” dalam ekonomi. Proses *asimetry information* antara swasta dan pemerintah maupun masyarakat dan pemerintah serta investasi asing membuat keadaan semakin memburuk. Keterangan pemerintah karena kurangnya informasi praktis telah membuat kegiatan ekonomi dalam posisi “*wait and see*”, baik pemegang rupiah maupun dollar. Dalam kondisi ini pemegang uang rupiah praktis mengalami devaluasi yang sampai saat ini sebesar 35-40% (bandingkanlah dengan devaluasi 1986 sebesar 45%). Kalau ditelusuri masa ke kelak, praktis rupiah didevaluasi tiap akhir PELITA. Hanya bedanya, sekarang devaluasi berjalan melalui mekanisme pasar (nilai rupiah dikoreksi oleh mekanisme pasar). Penyebab mengapa dollar terapresiasi adalah karena faktor eksternal yakni membaiknya ekonomi Amerika dewasa ini, dengan *rate of return* yang lebih tinggi telah mengalirkan investasi dollar ke pasar uang Amerika Serikat, sehingga pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat semakin membaik. Kelangkaan (*scarcity*) modal di Asia antara lain disebabkan kombinasi dari alasan mengalirnya sebagian modal ke berbagai tempat di dunia, seperti Amerika Latin, Rusia dan Eropa Timur. Majalah “Time” (Nopember 3, 1997) memperkirakan US \$ 1 - 16 billion ke luar ke Amerika Latin dan Eropa Timur melalui pasar uang Amerika (*mutual funds*). Di kedua kontinen ini terjadi proses privatisasi besar-besaran, perusahaan milik pemerintah termasuk penyediaan barang publik ke sektor swasta. Akibatnya di Asia permintaan terhadap dollar dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) dan *fortofolio investment* meningkat sedang penawaran (*supply*) dollar terbatas. Akibatnya nilai rupiah merosot dan diperketatnya likuiditas rupiah, sehingga perekonomian mengalami pukulan berat. Dalam kaitan ini, perusahaan swasta yang memiliki utang jatuh tempo mendorong pembelian dollar dan mungkin juga dikombinasi dengan kegiatan spekulasi uang. Salah satu kelemahan pinjaman uang swasta adalah digunakannya pinjaman komersial berbunga tinggi pada proyek yang hasilnya berjangka panjang. Akibatnya pihak swasta mengalami kesulitan membeli dollar karena: (a) rupiah diperketat likuiditasnya, dan (b) kelangkaan dollar dipasar uang. Semenjak rupiah mulai mengalami apresiasi 2-3 tahun lalu, juga seperti dialami oleh Baht-Thailand dan Ringgit-Malaysia dengan mudah dimanfaatkan oleh spekulator uang dari dalam dan manca negara.

## **Faktor Internal**

Penyebab dari faktor krisis keuangan dewasa ini dapat disebabkan: (a) dolar tidak menggali dollar, yang didapat dari luar tidak digunakan untuk memperkuat ekspor dan lebih bersifat konsumtif, (b) kondisi perbankan yang tidak sehat (terlalu banyak bank bermasalah dan tidak efisien), (c) sistem monitoring dan pengawasan (*surveillance system*) dibidang keuangan dan moneter sangat lemah dan tidak bekerja dengan baik, (d) faktor struktur ekonomi di berbagai bidang, sektor dan komoditi yang masih terdistorsi karena ketidaksempurnaan bekerjanya pasar, antara lain karena monopoli dan monopsoni dan sejenisnya, dan (e) *balance of payment* yang defisit (seperti ditunjukkan oleh Miranda dalam Lampiran 1).

Faktor-faktor internal di atas sesungguhnya jauh lebih baik apabila diletakkan atau membawanya ke dalam kerangka pemikiran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan implikasi ekonomi makronya. Krugman (1995) dalam bukunya menjelaskan dengan tegas bahwa pertumbuhan ekonomi Asia bukanlah keajaiban (*miracle*) seperti dalam laporan Bank Dunia. Saya teringat dua tahun lalu ketika Bank Dunia mengundang saya ke suatu pertemuan di Mauritius menjelaskan pada ekonom peserta dari negara Afrika bahwa tidak ada “*economic miracle*” di Asia. Kemudian tahun 1996 ketika ekonomi Thailand masih tinggi pertumbuhannya, pendapat Krugman ini saya ajukan lagi pada ekonom ASEAN. Mengapa ini saya kemukakan karena basis struktur dan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara masih rapuh (lemah). Dalam kesempatan ini, saya ingin dan rasakan perlu ditampilkan lagi pendapat Krugman tersebut. Berhasilnya negara Asia Tenggara dan Timur dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebelum krisis melanda karena dua faktor yaitu: (a) adanya mobilisasi sumberdaya alam dan tenaga kerja yang murah, baik *via* migrasi maupun dieksploitasinya kekayaan hutan dan tambang, dan (b) membanjirnya Foreign Direct Investment (FDI) ke Asia, menunjukan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi Asia itu kurang langgeng (*unsustainable*) karena faktor “*efficiency gain*” yang mana pertumbuhan diperkirakan sangat kecil. Kita mengetahui salah satu “*efficiency gain*” yang paling dominan adalah perubahan teknologi. Kalau dilihat kinerja ekonomi sampai saat ini dapat dikatakan sejalan dengan pendapat Krugman di atas. Masalah fundamental yang lebih luas adalah membuat *efficiency gain* dalam pertumbuhan kita harus membawa ekonomi Indonesia pada kondisi di mana perlu diberikan mekanisme pasar terkelola agar bekerja lebih sempurna dengan intervensi pemerintah dalam distribusi kesempatan berusaha dan bekerja yang

dirasakan perlu. Dengan kerangka pemikiran seperti ini sistem ekonomi kapitalis berwajah manusiawi dapat terwujud serta dapat menopang pembangunan ekonomi.

Dari uraian dan pendapat Krugman di atas, maka dapat dikatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia menghadapi gejala, masih lemah dan struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat rapuh. Sebagai bahan perbandingan, Lampiran 1 menyajikan beberapa indikator ekonomi makro Indonesia dan negara ASEAN lainnya.

## **DAMPAK KRISIS KEUANGAN TERHADAP EKONOMI, KHUSUSNYA SEKTOR PERTANIAN DAN AGRIBISNIS**

### **Perkiraan Dampak Krisis Keuangan Terhadap Ekonomi**

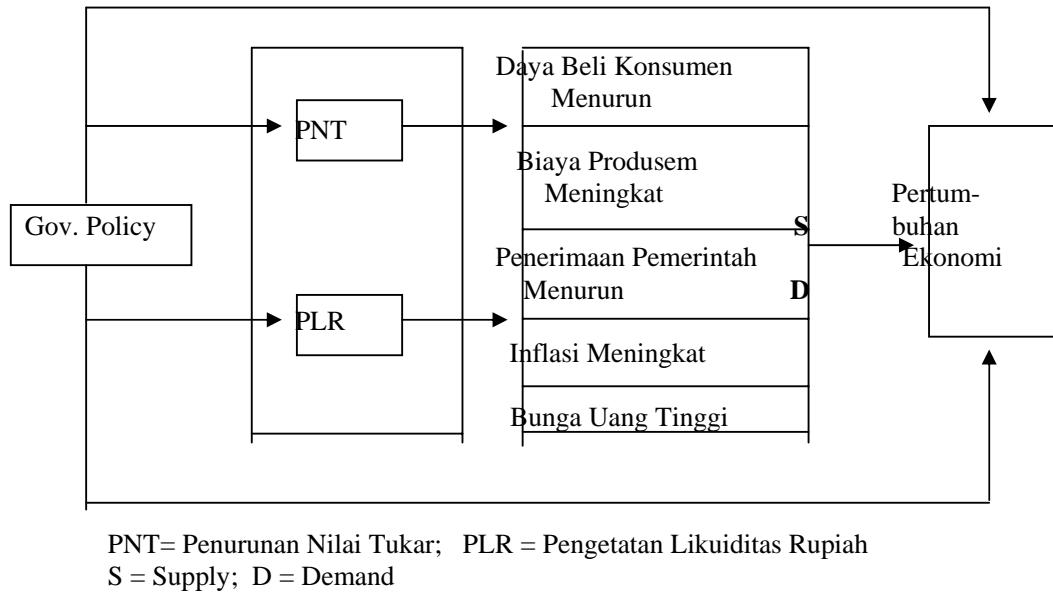
Dari uraian krisis keuangan dan penanggulangan secara praktis mengandung dua gejala: (a) Penurunan Nilai Tukar (PNT) dan (b) Pengetatan Likuiditas Rupiah (PLR). Kedua faktor penurunan nilai tukar dan pengetatan likuiditas lambat atau cepat akan berpengaruh terhadap seluruh elemen dan pelaku ekonomi. Kedua efek ini sangat sukar dipisahkan yang dapat digambarkan dalam skema sebab dan akibat berikut.

Secara teoritis dari diagramatis, dapat ditafsirkan bahwa dampak utama penurunan nilai tukar adalah secara efektif akan menurunkan daya beli (permintaan) konsumen terutama masyarakat berpendapatan menengah dan rendah (miskin). Dampak penurunan permintaan ini akan mendorong menurunnya produksi barang dan jasa. Dari sudut produsen, krisis penurunan nilai tukar dan naiknya bunga uang dan kandungan input impor cukup besar akan mendorong biaya produksi, sehingga harga barang naik. Besar kemungkinan tekanan inflasi terutama *cost push inflation* adalah bahaya yang datang menyelinap ke dalam ekonomi Indonesia. Apabila daya beli menurun serta harga barang dan jasa meningkat, maka kemungkinan besar perusahaan akan memotong jumlah produksi (*output*) yang dapat berdampak terhadap PHK tenaga kerja. Kalau ini terjadi maka *urban and rural unemployed labor* akan semakin meningkat. Ujungnya adalah keresahan sosial.

Kalau perusahaan mengurangi output, maka jumlah pajak yang dikumpulkan pasti berkurang sehingga total penerimaan (anggaran belanja) yang bersumber dari pajak akan berkurang. Di sisi penawaran (*supply*) faktor pemotong anggaran belanja ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ujungnya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi (7-8% per tahun) akan sangat sukar dipertahankan. Krisis ini telah menjungkir balikkan prediksi yang optimis (roses) dari pengamat pada awal dan pertengahan tahun 1997 ini. Faktor ini membuktikan bahwa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia senantiasa



sukar diperkirakan (*unpredictable*) karena sifat ketidak pastian telah *built-up* dalam stuktur ekonomi indonesia.



Bahaya lain yang datang setelah depresiasi rupiah (devaluasi) melalui mekanisme pasar adalah bahaya inflasi. Bahaya inflasi, secara teoritis datang dari proses berikut. Indonesia masih banyak mengimpor bahan baku dan barang modal yang cukup besar. Karena harga dollar yang relatif lebih mahal dibanding dengan rupiah, maka merosotnya nilai rupiah di satu pihak mendorong ekspor, akan tetapi melalui *time-lag* tertentu (2-3 tahun) akan bersifat *inflatoar* kerana sifat *cost-push inflation* tersebut. Kalau Indonesia tidak mampu mengurangi impor serta meningkatkan produktifitas ekonomi dan ekspor maka bahaya inflasi akan segera dihadapi karena sifat *cost-push inflation* tersebut. Kalau Indonesia tidak mampu mengurangi impor serta meningkatkan produktifitas ekonomi dan ekspor, maka bahaya inflasi akan segera dihadapi Indonesia.<sup>4)</sup>

4) Faktor musim kemarau panjang dan kebakaran hutan serta faktor alam lain akan dapaty memperburuk keadaan ekonomi terutama meningkatnya harga barang konsumsi yang berakhir pada peningkatan inflasi.

## Dampak Krisis Keuangan Terhadap Sektor Pertanian dan Agribisnis

Untuk memahami dampak krisis sektor keuangan terhadap sektor pertanian dapat dianalisis ditingkat mikro dalam arti *firm* (perusahaan) dan sektoral dalam arti agregasi sektor ke dalam ISIC 1 menurut BPS, secara ringkas variabel yang terpengaruh oleh krisis keuangan dapat dilihat pada Tabel 1. Gejala mata uang (*exchange rate*) yang berubah pasti akan merubah struktur biaya (*cost*) dan harga input-output. Melemahnya nilai rupiah terhadap dollar ini dipastikan berdampak terhadap sektor pertanian dan agribisnis. Ada dua atau lebih panel contoh yang dapat dimunculkan:

1. Bagi perusahaan pertanian yang kinerjanya di mana sumber bahan baku dari dalam negeri, gejala keuangan ini mungkin tidak demikian besar, dan apabila sebagian besar output diekspor, maka gejala keuangan akan bersifat positif.
2. Apabila agribisnis bersangkutan berbahan baku dari luar negeri (seperti kapas misalnya), maka implikasi gejala keuangan akan berpengaruh terhadap struktur biaya (meningkatkan biaya per unit input dan output) yang lebih besar. Apabila pasarnya dalam negeri, maka akan semakin suram. Dalam kondisi ini, gejala keuangan sekarang secara negatif berpengaruh terhadap kinerja agribisnis bersangkutan.

Tabel 1. Perkiraan Dampak Krisis Keuangan terhadap Sektor Pertanian dan Agribisnis dengan menggunakan Beberapa Variabel sebagai Indikator.

Indikator	Tanaman pangan	Perkebunan		Perikanan		Peter nakan●	Kehu tanan
		Besar	Rakyat	Laut	Darat		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Struktur Biaya	(-)	(-)	(=)	(-)	(-)	(-)	(-)
2. Harga Output	(=)	(=)	(=)	(=)	(=)	(+)	(=)
3. Nilai Asset	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4. Pendapatan/Keuntungan	(-)	(+)/(-)	(+)/(-)	(+)/(-)	(-)	(-)	(+)
5. Output	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)
6. T.Kerja	(-)	(=)	(-)	(=)	(-)	(-)	(+)
Jumlah.R.Tangga	23.187.784	1.346	6.376.000	660.000	410.000	480.000	656

Keterangan :

- : khusus ayam buras dan broiler
- (+) : naik
- (=) : netral
- (-) : turun

Apa yang ditunjukkan dari dua contoh panel agribisnis di atas dan kalau diagregasi secara sektoral, krisis keuangan sekarang dapat berpengaruh positif atau negatif tergantung pada: (a) sumber perolehan bahan baku (dalam atau luar negeri), (b) struktur pemasaran output (dalam atau luar negeri), dan (c) struktur permodalan, *equity* dan portofolio usaha agribisnis tersebut. Ditinjau dari struktur pembiayaan dan penerimaan, maka porsi impor input dan ekspor output dalam sektor pertanian akan secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja sektor pertanian. Dalam Lampiran 2 s/d 6 diuraikan kinerja pertanian dalam struktur GDP.

### **KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PDRB DAN PREDIKSI AKIBAT KRISIS MONETER**

PDRB sektor pertanian dalam tahun 1995 berdasarkan harga berlaku dan konstan 1993 menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PDRB masing-masing propinsi di Indonesia (Lampiran 2 & 3 ). Untuk propinsi-propinsi yang berada di wilayah Pulau Sumatra, persentase sektor pertanian berdasarkan harga berlaku mencapai lebih dari pada 20 persen dari total PDRB masing-masing propinsi, bahkan untuk propinsi Lampung hampir mencapai 40 persen. Sedangkan yang sumbangan sektor pertaniannya rendah hanya dialami oleh Propinsi Riau, yakni hanya sekitar 7 persen dari total PDRB. Dari lima sub sektor pertanian, sumbangan terbesar rata-rata berasal dari sub-sektor tanaman pangan, kecuali Sumatra Utara dan Sumatra Selatan dari sub-sektor perkebunan. Demikian juga halnya jika dilihat berdasarkan harga konstan, sumbangan sektor pertanian masing-masing propinsi masih menunjukkan kontribusi yang cukup besar kecuali Propinsi Riau.

Untuk propinsi yang berada di wilayah Pulau Jawa, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai diatas 15 persen, kecuali DKI Jakarta. Sumbangan tersebut sebagian besar berasal dari sub-sektor tanaman pangan. Sementara untuk propinsi di wilayah Pulau Kalimantan, sumbangan sektor pertanian diatas 20 persen, kecuali Kalimantan Timur sumbangan tersebut didominasi oleh sub-sektor kehutanan, kecuali Kalimantan Selatan yang sebagian besar dihasilkan dari sub-sektor tanaman pangan.

Propinsi di Wilayah Pulau Sulawesi mempunyai sumbangan dari sektor pertanian yang terbesar dibanding dengan wilayah lain yakni rata-rata mencapai lebih dari 30 persen. Kontribusi tersebut sebagian besar berasal dari sub-sektor tanaman pangan. Sedangkan untuk propinsi di wilayah lainnya, kontribusi sektor pertanian mencapai lebih dari 20 persen,

kecuali Irian Jaya. Sedangkan kontribusi terbesar berasal dari sub-sektor tanaman pangan, kecuali Maluku yang berasal dari sub-sektor perikanan.

Kemudian jika dilihat sumbangan sektor pertanian masing-masing propinsi terhadap PDB sektor pertanian Indonesia, maka dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar adalah propinsi yang berada di wilayah Pulau Jawa yakni Propinsi Jawa Barat (15%), Jawa Tengah (13%) dan Jawa Timur (15%) dengan kontribusi terbesar berasal dari sub-sektor tanaman pangan (Lampiran 4 & 5 ). Sementara jika dilihat sumbangan terbesar untuk masing-masing sub-sektor berdasarkan harga konstan 1993, Jawa Barat memberikan kontribusi terbesar untuk sub sektor tanaman Pangan yakni sebesar 21 persen. Kemudian untuk sub-sektor perkebunan yang memberi sumbangan terbesar adalah Sumatra Utara yaitu sebesar 23 persen, untuk peternakan propinsi Jawa Tengah (18%), kehutanan adalah Propinsi Kalimantan Timur (17%) dan untuk perikanan adalah Jawa Timur yakni mencapai 11 persen.

Jika melihat penyerapan dan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, dari 27 propinsi yang ada di Indonesia, antara tahun 1986 dengan 1995 hanya propinsi Irian Jaya yang penyerapan tenaga kerja di sektor pertaniannya mengalami kenaikan, sedangkan propinsi lainnya mengalami penurunan. Dengan demikian secara total terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian di Indonesia mengalami penurunan antara tahun 1986 dengan 1995 yakni sebesar 10,1 persen dengan tingkat produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 1995 sebesar 1,63 (Lampiran 6).

Dengan berdasarkan indikator perubahan seperti pada Tabel 1, dapat dikemukakan prediksi akibat krisis moneter terhadap sektor pertanian. Dengan anggapan bahwa indikator perubahan pada Tabel 1 adalah benar, maka dapat diketahui sub-sektor pertanian yang menjadi andalan atau penyumbang kontribusi terbesar terhadap PDRB dari sektor pertanian mengalami penurunan, kenaikan atau tetap/tidak terpengaruh akibat krisis moneter di masing-masing propinsi yang ada di Indonesia.

Sebagai contoh, di wilayah Sumatera sub-sektor perkebunan cenderung mendominasi terhadap kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, utamanya Propinsi Sumatra Utara dan Sumatera Selatan. Berdasarkan indikator perubahan di atas, maka akibat krisis moneter akan sangat berpengaruh positif terhadap perekonomian propinsi tersebut, utamanya terhadap output untuk perkebunan besar

Untuk propinsi di wilayah Pulau Jawa, PDRB dari sektor pertanian didominasi oleh sub-sektor tanaman pangan dan peternakan. Berdasarkan indikator perubahan, secara umum krisis moneter akan berpengaruh negatif (turun) terhadap sub-sektor tersebut, kecuali harga

output yang tidak terpengaruh atau netral untuk tanaman pangan dan berpengaruh positif (naik) terhadap peternakan. Sedangkan untuk Propinsi di Pulau Kalimantan cenderung didominasi oleh subsektor ehutanan, utamanya Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sub-sektor kehutanan ini sangat terpengaruh oleh terjadinya krisis moneter, utamanya dalam hal pendapatan/keuntungan, output dan tenaga kerja yang berpengaruh positif (naik).

Krisis keuangan yang terjadi sekarang memaksa pemilik modal dan manajer agribisnis membuat reevaluasi tentang nilai aset yang dimiliki. Kalau aset dihitung dalam rupiah, maka gejolak keuangan dan devaluasi sekarang akan berpengaruh terhadap keseluruhan kinerja sektor pertanian. Kalau aset perusahaan dalam dollar, maka gejolak mata uang menguatnya dollar semakin menguatkan posisi sektor pertanian. Akan tetapi kasus sektor pertanian Indonesia lebih cenderung pada rupiah yang semakin menurun nilainya.

Kalau dilihat dari hasil analisis dalam Tabel 1. kemungkinan pengaruh krisis keuangan sekarang ini berdampak negatif terhadap pertanian rakyat. Mengingat sektor pertanian rakyat. mempekerjakan banyak tenaga kerja, maka perlu perhatian terhadap kemungkinan bertambahnya pengangguran.

Lebih jauh lagi adalah sub sektor pertanian yang menggunakan barang modal yang diimpor akan segera meningkatkan biaya per unit output yang secara efektif dapat mengurangi kemampuan kompetisi barang kita di pasar internasional. Biasanya suatu ekonomi sehabis devaluasi, di mana harga dollar lebih tinggi dengan *time lag* tertentu akan diikuti oleh inflasi. Tergantung dari jenis inflasi apa yang akan datang (*demand or cost push inflation*) akan berpengaruh negatif atau positif terhadap sektor pertanian. Biasanya *demand pull inflation* dapat berperan positif terhadap sektor pertanian.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Krisis keuangan di Indonesia yang ditandai oleh melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS. berdampak terhadap sektor pertanian/agribisnis. Namun intensitas dampaknya tergantung pada: (1) sumber perolehan bahan baku (dalam atau luar negeri), (2) struktur pemasaran output (dalam atau luar negeri), dan (3) struktur permodalan, *equity* dan portofolio usaha agribisnis tersebut. Ditinjau dari struktur pembiayaan dan penerimaan maka porsi impor input dan ekspor output dalam sektor pertanian akan secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja sektor pertanian.

Bagi perusahaan pertanian atau agribisnis yang menggunakan bahan bakunya dari dalam negeri, gejolak keuangan mungkin tidak berpengaruh demikian besar, dan apabila sebagian besar output diekspor, maka akan memiliki dampak positif. Namun apabila perusahaan agribisnis bersangkutan menggunakan bahan baku dari luar negeri (seperti kapas misalnya), maka implikasi gejolak keuangan akan berpengaruh terhadap struktur biaya (meningkatkan biaya per unit input dan output) yang lebih besar. Apabila pasarnya dalam negeri, maka akan semakin suram. Dalam kondisi ini, gejolak keuangan berpengaruh negatif terhadap kinerja agribisnis bersangkutan.

### **Saran**

Kemungkinan pengaruh krisis keuangan sekarang ini berdampak negatif terhadap pertanian rakyat. Mengingat sektor pertanian rakyat mempekerjakan banyak tenaga kerja, maka perlu perhatian terhadap kemungkinan bertambahnya pengangguran.

Akibat krisis keuangan sekarang, sangat perlu diadakan suatu evaluasi kembali untuk menghitung *rate of return investment (ROI)* di sektor pertanian. Pada masa lalu ROI di sektor pertanian hanya berkisar 15 persen. Tidaklah mustahil kalau krisis ini membuat sektor pertanian rakyat semakin tidak menarik bagi investor.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiningsih, Sri. 1997. "The Asean Financial Market An Overview". 22<sup>nd</sup> Federation of Asean Economic Association (FAEA) Conference Bali-Indonesia 24-25 October 1997.
- Econit's. 1997. "Alternatif Kebijakan Menghadapi Krisis Nilai Tukar dan Likuiditas: Pride-Driven Policy vs. Rational-Driven Policy". Public Policy Review 30 Agustus 1997.
- Husnan Suad. 1997. "Pelajaran dari Krisis Sektor Keuangan Indonesia". Makalah pada Seminar Nasional ISEI Yogyakarta, dengan tema: Prospek Ekonomi Indonesia, Tantangan dan Peluang Sektor Keuangan, 11 Oktober 1997.
- Krugman, P. 1994. "Economic Sense and Non-Sense in the Age of Diminished Expectations PEDDLING PROSPERITY". W.W. Norton & Company, Inc.
- Krugman, P. 1995. "The Age of Diminished Expectations (US. Economic Policy in the 1990s)". The Washington Post Company (1990) as the first book in their series briefing books.
- McLeod Ross H. 1994., "Indonesia's Foreign Debt". In Ross H. McLeod (ed), Indonesia Assessment: Finance as a key sector in Indonesia's Development, Research School of Pacific and Asian Studies, Canberra and Institute of South East Asian Studies Singapore. Comment by Redelet Seteven (1995), "Indonesia Foreign Debt: Headed for Crisis of Finance Sustainable Growth". BIES, 31 (3). See Comment by Ross H. McLeod (1996) and Final Reply by Steven Redelet in BIES, 32 (2), 1996.

- Mulyani, Sri Indrawati. 1997. "Gejolak Mata Uang dan Implikasi Kebijakan: ISEI Jaya, LPEM-FEUI.
- Nopirin. ?. "Prospek Sektor Perbankan Indonesia: Beberapa Agenda Penting". Makalah pada Seminar Tantangan Perbankan pada Abad 21.
- Nasution, Anwar. 1997. "The Recent Financial Crisis in Indonesia". A Paper Presented at Conference on "Money and Financial Markets in Asia: A Challenge to Asian Industrialization". San Francisco, 15-16 September 1997.
- Ortiz Guillermo. 1995. "How We're Handling the Peso Crisis". Pusat Data Business Indonesia, 6-7 Januari 1995.
- Usman, Marzuki. 1997. "Kelembagaan Sektor Keuangan dalam Menghadapi Abad ke-21". Makalah pada Seminar yang bertema "Prospek Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang Sektor Keuangan". Yogyakarta 11 Oktober 1997.

Lampiran 1  
Macro Economic Indicator in Asean Countries

Indicators of Macroeconomics	Countries								
	Singapore	Brunei	Malaysia	Thailand	Phillip-Pines	Indonesia	Laos	Cambodia	Vietnam
Per Capita GDP/GDNP (US\$ 1993)	27.990	15.930 (a)	4.240	2.810	1.050	1.050	360	290	260
Population (Million) 1993	3,0	0,3	19,9	39,4	67,6	193,8	4,9	10,2	74,5
Annual Average GDP Growth Rate 1991-1993	8,5	1,4	8,6	8,5	2,2	7,8	6,4	3,9	8,2
Saving Rate (% of GDP) 1993	52,0	-	37,2	36,5	14,7	35,8	-	8,3	19,0
Investment Rate (% of GDP) 1993	33,2	-	40,6	43,1	22,3	37,8	,	21,8	27,1
Budgetary Balance/GDP (%) 1991-1993	4,7	-	-0,3	2,9	-0,6	-0,3	-4,7 (c)	-5,3	-3,4
Average Annual Inflation rates 1991-1995	2,6	2,4 (b)	4,1	4,8	10,5	8,9	11,1	65,0	23,5
Real GDP Growth (%)	7,0	2,8	8,2	6,7	5,7	7,8	6,8	7,0	9,5
Inflation (%)	2,0	2,0	3,5	4,8	5,3	6,5	7,3	7,0	7,8
Exchange Rate (Per US \$, End Period)	1,4	1,4	2,5	25,0	26,2	2.383	954	2.720	11.000

Sources: The ASEAN Macroeconomics An Overview by Miranda S. Goeltom, 1997

a. 1994

b. 1991-1994

c. 1991-1993

Lampiran 2  
 Persentase PDRB Sektor Pertanian Tahun 1995 Menurut Propinsi Berdasarkan Harga Berlaku

Propinsi	Sektor Pertanian					
	Tan.Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Total
Dista Aceh	8.97	3.93	3052	3.41	3.27	23.10
Sumatera Utara	8.55	9.72	2.76	1.38	2.56	24.98
Sumatera Barat	11.58	3.00	2.36	2.28	2.05	21.26
R I a u	2.04	2.02	0.44	1.91	0.98	7.39
J a m b i	12.21	7.16	2.91	5.43	0.75	28.18
Sumatera Selatan	5.21	10.35	1.67	2.52	2.51	22.26
Bengkulu	18.95	9.44	3.59	2.64	2.41	37.04
Lampung	19.20	9.92	5.66	0.36	4.48	39.62
DKI Jakarta	0.12	0.02	0.02	0.00	0.06	0.22
Jawa Barat	11.41	1.10	2.17	0.13	0.79	15.62
Jawa Tengah	15.59	1.25	3.06	1.67	1.07	22.64
Dista Yogyakarta	13.42	0.67	2.54	0.01	0.17	16.83
Jawa Timur	10.69	2.45	2.18	0.51	1.28	17.12
Kalimantan Barat	7.90	4.83	2.37	7.94	1.73	24.77
Kalimantan Timur	5.79	4.90	1.35	21.37	4.47	38.08
Kalimantan.Selatan	9.24	4.11	1.48	2.47	6.22	23.52
Kalimantan.Timur	1.68	0.40	0.94	5.33	1.14	9.49
Sulawesi.Utara	9.91	9.39	2.28	2.53	3.21	27.32
Sulawesi.Tengah	18.39	8.81	5.16	3.86	3.65	39.86
Sulawesi.Selatan	25.57	4.82	1.32	0.23	7.19	39.14
Sulawesi. Tenggara	14.11	6.83	5.35	1.63	5.51	33.42
B a l i	11.34	1.38	4.95	0.00	2.38	20.05
Nusa Tenggara Barat	26.32	2.75	4.71	1.16	3.29	38.23
Nusa Tenggara Timur	21.78	4.01	10.35	0.53	3.04	39.71
M a l u k u	6.12	4.95	1.01	7.13	7.87	27.08
Iria n Jaya	7.35	0.36	1.30	6.41	2.88	18.31

Keterangan: Data diolah oleh Center for Economic and Social Studies (CESS), Jakarta.

Lampiran 3  
 Persentase PDRB Sektor Pertanian Tahun 1995 Menurut Propinsi Berdasarkan Harga Konstan 1993

Propinsi	Sektor Pertanian
----------	------------------



	Tan.Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Total
Dista Aceh	6.78	2.38	2.34	3.21	2.86	17.57
Sumatera Utara	9.21	9.99	2.90	1.46	2.59	26.15
Sumatera Barat	11.56	2.80	2.41	2.33	2.04	21.14
R i a u	2.11	1.96	0.35	1.66	0.96	7.04
J a m b i	12.15	7.44	2.85	5.01	0.84	27.98
Sumatera Selatan	5.04	8.66	1.61	2.15	2.36	19.82
Bengkulu	16.62	4.86	3.54	3.27	2.99	31.29
Lampung	17.11	8.18	6.06	0.32	3.89	35.57
DKI Jakarta	0.12	0.02	0.02	0.00	0.05	0.20
Jawa Barat	11.04	1.12	2.18	0.15	0.88	15.37
Jawa Tengah	13.25	1.19	3.41	1.53	1.23	20.62
Dista Yogyakarta	12.45	0.70	2.47	0.01	0.16	15.76
Jawa Timur	11.11	2.43	1.92	0.46	1.21	17.13
Kalimantan Barat	6.99	4.61	2.33	8.17	1.71	23.80
Kalimantan Timur	5.97	4.62	1.34	22.00	4.33	38.26
Kalimantan.Selatan	8.71	3.60	1.44	2.51	6.26	22.51
Kalimantan.Timur	1.68	0.43	1.04	5.37	1.09	9.60
Sulawesi.Utara	10.38	9.25	2.22	2.49	3.29	27.57
Sulawesi.Tengah	18.40	7.27	4.32	3.62	3.38	36.99
Sulawesi.Selatan	28.27	4.74	1.42	0.22	7.36	37.02
Sulawesi. Tenggara	14.39	6.70	3.99	1.64	5.46	32.18
B a l i	11.42	1.48	5.27	0.00	2.05	20.23
Nusa Tenggara Barat	25.25	2.48	4.72	1.09	3.44	36.99
Nusa Tenggara Timur	21.58	3.83	9.02	0.57	3.13	38.14
M a l u k u	6.37	3.77	0.83	7.50	8.89	27.57
Iria n Jaya	7.27	0.35	1.31	6.65	2.98	18.36

Keterangan: Data diolah oleh Center for Economic and Social Studies (CESS), Jakarta.

Lampiran 4  
 Persentase PDRB Sektor Pertanian Tahun 1995 Menurut Propinsi Terhadap PDB  
 Sektor Pertanian Indonesia Berdasarkan Harga Berlaku

Propinsi	Sektor Pertanian					
	Tan.Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Total
Dista Aceh	2.91	4.22	5.14	6.23	6.00	3.99
Sumatera Utara	5.29	19.92	7.71	4.81	8.97	8.23
Sumatera Barat	2.35	2.02	2.16	2.61	2.35	2.30
R I a u	1.09	3.57	1.06	5.73	2.97	2.10
J a m b i	1.06	2.05	1.13	2.51	0.37	1.30
Sumatera Selatan	1.90	12.52	2.74	5.18	5.19	4.33
Bengkulu	0.99	1.64	0.85	0.78	0.71	1.03
Lampung	3.86	6.61	5.13	0.40	5.10	4.24
DKI Jakarta	0.21	0.11	0.14	0.00	0.61	0.20
Jawa Barat	20.95	6.67	17.99	1.60	8.22	15.28
Jawa Tengah	17.96	4.77	15.93	10.86	6.97	13.90
Dista Yogyakarta	1.89	0.31	1.62	0.01	0.14	1.26
Jawa Timur	17.74	13.47	16.34	4.73	12.06	15.12
Kalimantan Barat	1.41	2.89	1.91	8.00	1.76	2.36
Kalimantan Timur	0.67	1.89	0.71	14.17	2.95	2.36
Kalimantan.Selatan	1.42	2.09	1.02	2.13	5.41	1.93
Kalimantan.Timur	0.92	0.73	2.32	16.38	3.52	2.76
Sulawesi.Utara	0.94	2.96	0.98	1.35	1.73	1.38
Sulawesi.Tengah	1.18	1.87	1.49	1.40	1.32	1.36
Sulawesi.Selatan	6.59	4.12	1.54	0.34	10.49	5.38
Sulawesi. Tenggara	0.64	1.03	1.10	0.42	1.42	0.81
B a l i	2.10	0.85	4.15	0.00	2.50	1.98
Nusa Tenggara Barat	2.28	0.79	1.84	0.57	1.62	1.77
Nusa Tenggara Timur	1.57	0.96	3.37	0.22	1.24	1.53
M a l u k u	0.48	1.28	0.35	3.13	3.46	1.12
Iria n Jaya	1.29	0.21	1.03	6.33	2.86	1.71

Keterangan: Data diolah oleh Center for Economic and Social Studies (CESS), Jakarta.

Lampiran 5  
 Persentase PDRB Sektor Pertanian Tahun 1995 Menurut Propinsi Terhadap PDB  
 Sektor Pertanian Indonesia Berdasarkan Harga Konstan 1993

Propinsi	Sektor Pertanian
----------	------------------

	Tan.Pangan	Perkebunan	Peternakan	Kehutanan	Perikanan	Total
Dista Aceh	2.91	4.22	5.14	6.23	6.00	3.99
Sumatera Utara	5.29	19.92	7.71	4.81	8.97	8.23
Sumatera Barat	2.35	2.02	2.16	2.61	2.35	2.30
R i a u	1.09	3.57	1.06	5.73	2.97	2.10
J a m b i	1.06	2.05	1.13	2.51	0.37	1.30
Sumatera Selatan	1.90	12.52	2.74	5.18	5.19	4.33
Bengkulu	0.99	1.64	0.85	0.78	0.71	1.03
Lampung	3.86	6.61	5.13	0.40	5.10	4.24
DKI Jakarta	0.21	0.11	0.14	0.00	0.61	0.20
Jawa Barat	20.95	6.67	17.99	1.60	8.22	15.28
Jawa Tengah	17.96	4.77	15.93	10.86	6.97	13.90
Dista Yogyakarta	1.89	0.31	1.62	0.01	0.14	1.26
Jawa Timur	17.74	13.47	16.34	4.73	12.06	15.12
Kalimantan Barat	1.41	2.89	1.91	8.00	1.76	2.36
Kalimantan Timur	0.67	1.89	0.71	14.17	2.95	2.36
Kalimantan.Selatan	1.42	2.09	1.02	2.13	5.41	1.93
Kalimantan.Timur	0.92	0.73	2.32	16.38	3.52	2.76
Sulawesi.Utara	0.94	2.96	0.98	1.35	1.73	1.38
Sulawesi.Tengah	1.18	1.87	1.49	1.40	1.32	1.36
Sulawesi.Selatan	6.59	4.12	1.54	0.34	10.49	5.38
Sulawesi. Tenggara	0.64	1.03	1.10	0.42	1.42	0.81
B a l i	2.10	0.85	4.15	0.00	2.50	1.98
Nusa Tenggara Barat	2.28	0.79	1.84	0.57	1.62	1.77
Nusa Tenggara Timur	1.57	0.96	3.37	0.22	1.24	1.53
M a l u k u	0.48	1.28	0.35	3.13	3.46	1.12
Iria n Jaya	1.29	0.21	1.03	6.33	2.86	1.71

Keterangan: Data diolah oleh Center for Economic and Social Studies (CESS), Jakarta.

Lampiran 6  
Tingkat Penyerapan dan Produktifitas Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian Menurut Propinsi

Propinsi	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (%)	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Tahun 1995
----------	-------------------------------------	---

	1986	1995	
Dista Aceh	68.58	57.89	2.51
Sumatera Utara	63.63	56.35	2.22
Sumatera Barat	58.30	50.86	1.65
R i a u	64.58	56.82	1.57
J a m b i	71.41	58.86	1.42
Sumatera Selatan	64.76	60.88	1.37
Bengkulu	77.66	67.66	1.16
Lampung	75.92	60.26	1.35
DKI Jakarta	2.08	1.06	3.52
Jawa Barat	45.72	30.74	2.06
Jawa Tengah	50.12	39.98	1.44
Dista Yogyakarta	52.84	38.55	1.30
Jawa Timur	55.84	44.53	1.34
B a l i	56.75	41.69	1.95
Nusa Tenggara Barat	66.47	52.54	1.25
Nusa Tenggara Timur	80.02	69.98	0.79
Kalimantan Barat	67.89	71.23	1.25
Kalimantan Tengah	69.28	61.18	3.12
Kalimantan.Selatan	61.60	47.27	1.85
Kalimantan.Timur	45.53	41.09	4.66
Sulawesi.Utara	55.91	53.01	1.59
Sulawesi.Tengah	69.91	61.98	1.43
Sulawesi.Selatan	58.08	59.40	1.83
Sulawesi. Tenggara	72.36	60.51	1.21
M a l u k u	73.59	62.77	1.52
Iria n Jaya	68.70	74.59	1.74
Indonesia	55.09	45.06	1.63

Keterangan: Data diolah oleh Center for Economic and Social Studies (CESS), Jakarta.